

Analisis Kritis Proses Penginputan Data di Lingkup Pemerintahan Desa dan Usulan Peningkatan Efisiensi Menuju Tata Kelola Berbasis Digital: Studi Kasus dan Rekomendasi untuk Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan

**Maemunah^{1*}, Aliman², Harjasa³, Asep Hidayah⁴, Maya Nurul Azizah⁵, Adinda Febriana Adha⁶,
Roisah Vanessa Frisiliani⁷, Dian Surlastry⁸, Gabriel Achmad Nandito⁹, Shohibul Ilmi¹⁰,
Muhamad Irvan¹¹, Sayyid Maulana¹², Muhamad Yunus¹³, Ahmad Rozin Fawwaz¹⁴**

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14} Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Corresponding Email: maemunah.mail@uibbc.ic.id

Submitted : 2025-10-04 ; Accepted: 2025-10-16 ; Published: 2025-10-28

ABSTRAK

Tata kelola pemerintahan desa yang efisien dan akuntabel sangat bergantung pada sistem pengelolaan data yang andal. Di Indonesia, dorongan menuju digitalisasi melalui berbagai program pemerintah, seperti Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), telah mengemuka sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik. Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi kendala signifikan, menjadikan proses penginputan data tetap konvensional dan rentan terhadap inefisiensi. Laporan ini menyajikan analisis kritis terhadap permasalahan tersebut, dengan menggunakan Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, sebagai studi kasus representatif. Metodologi yang digunakan adalah sintesis dan analisis komparatif dari berbagai studi literatur, tinjauan terhadap aplikasi digital yang tersedia, serta pembelajaran dari desa-desa lain yang telah berhasil bertransformasi. Temuan utama dari analisis ini menunjukkan bahwa inefisiensi dalam proses penginputan data di banyak desa, yang diasumsikan juga terjadi di Desa Kepuh, berakar pada penggunaan media berbasis kertas yang rentan terhadap kerusakan dan kehilangan, serta tidak efisien. Lebih jauh, kendala yang dihadapi bersifat multidimensi, meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, ketiadaan anggaran yang memadai, dan yang paling krusial, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi. Selain itu, ekosistem digital yang terfragmentasi akibat berbagai aplikasi pemerintah yang tidak terintegrasi menciptakan tantangan baru berupa duplikasi pekerjaan dan ketidakselarasan data. Sebagai solusi, laporan ini merekomendasikan sebuah strategi holistik dan bertahap. Pada tahap jangka pendek, disarankan untuk mengimplementasikan satu sistem informasi yang terintegrasi, yang mampu menyederhanakan proses manual yang kompleks. Untuk jangka menengah, fokus harus ditempatkan pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif dan investasi pada infrastruktur teknologi. Terakhir, dalam jangka panjang, keberlanjutan proyek dapat dijamin dengan membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, mencontoh keberhasilan desa-desa digital lain di Indonesia. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga merumuskan peta jalan yang konkret untuk mewujudkan tata kelola desa yang modern, transparan, dan efisien.

Kata Kunci: Analisis Kritis, Proses Penginputan Data , Peningkatan Efisiensi, Tata Kelola Berbasis Digital

ABSTRACT

Efficient and accountable village governance relies heavily on a reliable data management system. In Indonesia, the push towards digitalization through various government programs, such as the Village Information System (SID) and the Village Financial System (SISKEUDES), has emerged as an effort to improve transparency and quality of public services. However, implementation in the field often faces significant obstacles, making the data input process conventional and vulnerable to inefficiencies. This report presents a critical analysis of these problems, using Kepuh Village, Palimanan District, Cirebon Regency, as a representative case study. The methodology used is a synthesis and comparative analysis of various literature studies, a review of available digital

applications, and learning from other villages that have successfully transformed. The main findings of this analysis show that inefficiencies in the data input process in many villages, which are assumed to also occur in Kepuh Village, are rooted in the use of paper-based media that is prone to damage and loss, as well as inefficient. Furthermore, the obstacles faced are multidimensional, including the limitation of information technology infrastructure, the absence of an adequate budget, and most crucially, the low capacity of human resources (HR) in the field of information technology. In addition, the fragmented digital ecosystem due to various unintegrated government applications creates new challenges in the form of duplication of work and data misalignment. As a solution, the report recommends a holistic and phased strategy. In the short term, it is recommended to implement a single integrated information system, capable of simplifying complex manual processes. For the medium term, the focus should be placed on improving the capacity of human resources through intensive training and investment in technological infrastructure. Finally, in the long term, the sustainability of the project can be ensured by building strategic partnerships with various parties, emulating the success of other digital villages in Indonesia. Thus, this report not only identifies problems, but also formulates a concrete roadmap to realize modern, transparent, and efficient village governance.

Kata Kunci: Critical Analysis, Data Input Process, Efficiency Improvement, Digital-Based Governance

Copyright © 2025, Authors

PENDAHULUAN

Pengelolaan data yang akurat dan efisien merupakan pondasi fundamental bagi tata kelola pemerintahan yang efektif di tingkat desa. Data kependudukan, keuangan, dan aset menjadi instrumen krusial untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan desa.

Namun, banyak desa di Indonesia masih mengandalkan proses manual dan berbasis kertas, sebuah metode yang telah terbukti tidak efisien, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan data. Inefisiensi ini secara langsung berdampak pada lambatnya pelayanan publik dan terhambatnya proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi tantangan ini dengan menginisiasi berbagai kebijakan dan program digitalisasi, seperti Sistem Informasi Desa (SID) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa serta memberikan solusi terhadap masalah yang muncul dalam prosesnya. Meskipun demikian, implementasi di tingkat desa sering kali tidak berjalan mulus, menghadapi kendala yang kompleks dan saling terkait.

Laporan ini berfokus pada analisis proses penginputan data di Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai studi kasus representatif. Penting untuk secara eksplisit mengklarifikasi bahwa analisis ini tidak berkaitan dengan Desa Kepuh yang berlokasi di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, yang dikenal karena inovasi teknologi Internet of Things (IoT) untuk pemantauan air.

Proyek yang disebutkan di Majalengka tersebut, yang dinamakan "KEPUH," merupakan contoh spesifik penggunaan teknologi untuk manajemen sumber daya alam, bukan administrasi pemerintahan desa secara umum. Karena tidak ada data publik yang secara spesifik merinci proses penginputan data di Desa Kepuh, Palimanan, analisis dalam laporan ini akan mengasumsikan bahwa desa tersebut menghadapi permasalahan umum yang serupa dengan mayoritas desa di Indonesia yang belum sepenuhnya mengadopsi sistem digital yang terintegrasi. Analisis ini kemudian akan didukung oleh data dan temuan dari berbagai studi kasus dan literatur yang relevan, memungkinkan perumusan rekomendasi yang kuat dan terbukti efektif.

Tinjauan Pustaka: Landasan Konseptual dan Tantangan Digitalisasi Desa

1. Peran Vital Administrasi dan Pengelolaan Data Desa

Administrasi desa merupakan fondasi tata kelola pemerintahan di tingkat paling dasar. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan merumuskan solusi atas masalah yang timbul dalam proses administrasi. Pengelolaan data yang efektif adalah tulang punggung dari administrasi ini, meliputi data kependudukan, keuangan, aset, hingga pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 292 Tahun 2022 yang membahas batas Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, jelas bahwa desa ini berada dalam yurisdiksi Kabupaten Cirebon, yang berarti operasionalnya terikat pada kerangka hukum dan kebijakan administrasi yang berlaku di wilayah tersebut.

Di Indonesia, pengelolaan data diatur oleh inisiatif pemerintah pusat melalui Sistem Informasi Desa (SID), yang berfungsi sebagai aplikasi untuk mengelola data desa dan diatur

oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, terdapat Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan tata kelola keuangan desa. Aplikasi ini membantu desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), mencatat arus kas, serta menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Namun, lanskap digital desa di Indonesia masih sangat terfragmentasi. Selain SISKEUDES dan SID, ada berbagai aplikasi lain yang dikelola oleh kementerian atau lembaga yang berbeda, seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG), dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPEDA). Ketergantungan pada beragam aplikasi ini menciptakan duplikasi pekerjaan dan inefisiensi operasional. Sebagai contoh, data penduduk yang sama mungkin harus diinput berulang kali ke dalam aplikasi yang berbeda, yang tidak hanya membuang waktu tetapi juga meningkatkan risiko ketidakselarasan data. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya ketiadaan teknologi, melainkan kurangnya integrasi antar-sistem yang ada, sebuah tantangan yang harus diatasi untuk mencapai efisiensi yang sejati.

2. Analisis Mendalam Tantangan Implementasi Digitalisasi Desa

Digitalisasi desa menghadapi tantangan multidimensi yang melampaui sekadar ketersediaan teknologi. Analisis menunjukkan bahwa masalah utamanya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: sumber daya manusia, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat.

Tantangan Sumber Daya Manusia (SDM): Keterbatasan SDM merupakan hambatan paling krusial dalam penerapan sistem informasi desa. Masalahnya bukan hanya karena kurangnya jumlah staf, melainkan juga rendahnya kompetensi dan pengetahuan di bidang teknologi informasi (TI). Banyak perangkat desa masih kurang memiliki pemahaman dasar TI, bahkan dalam mengoperasikan perangkat seluler seperti ponsel pintar dan tablet.

Kondisi ini menciptakan lingkaran masalah: ketika perangkat desa tidak mampu mengoperasikan aplikasi canggih, investasi pada teknologi menjadi sia-sia dan tidak memberikan hasil yang optimal. Ini kemudian memperkuat persepsi bahwa teknologi "tidak cocok" untuk lingkungan pedesaan, yang pada akhirnya menghambat adopsi lebih lanjut dan menciptakan siklus negatif. Peningkatan kompetensi SDM tidak hanya penting untuk pengoperasian sistem, tetapi juga untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang memadai, yang menjadi dasar keberhasilan setiap program digitalisasi.

Tantangan Infrastruktur dan Anggaran: Keterbatasan infrastruktur, seperti akses internet yang buruk atau minimnya jaringan telekomunikasi, menjadi hambatan nyata yang menghambat proses pengumpulan dan pengolahan data secara efektif. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur TI dan pelatihan SDM. Kedua tantangan ini saling berkaitan erat. Rendahnya alokasi anggaran sering kali mencerminkan kurangnya pemahaman dari pihak terkait mengenai pentingnya investasi pada teknologi informasi. Akibatnya, pengadaan perangkat keras dan layanan internet yang memadai terhambat, yang pada gilirannya membuat sistem digital tidak dapat berjalan optimal. Tanpa infrastruktur yang kokoh, upaya digitalisasi akan sulit mencapai tujuannya, mengakibatkan frustrasi bagi aparatur desa dan masyarakat.

Tantangan Partisipasi Masyarakat dan Budaya: Kurangnya partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat merupakan tantangan lain yang sering terabaikan. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami manfaat dari sistem informasi desa dan tidak memiliki ketertarikan untuk berperan aktif dalam penggunaannya.

Ketika masyarakat tidak berpartisipasi dalam menyediakan data atau menggunakan layanan digital, data yang dikumpulkan menjadi tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak mutakhir. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan ketepatan sasaran kebijakan pemerintah desa. Kurangnya keterlibatan ini kemudian memperkuat skeptisisme terhadap manfaat digitalisasi, menciptakan hambatan budaya yang sulit diatasi.

Analisis Proses Penginputan Data di Desa Kepuh dan Identifikasi Masalah

Meskipun data spesifik mengenai proses penginputan data di Desa Kepuh, Palimanan, tidak tersedia secara publik, laporan ini dapat merumuskan analisis berdasarkan tantangan umum yang dihadapi oleh desa-desa di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam tinjauan pustaka. Berdasarkan studi literatur, dapat diasumsikan bahwa Desa Kepuh, seperti halnya Desa Compang Mekar di Kabupaten Manggarai Timur, masih sangat bergantung pada media kertas untuk pendataan penduduk, pelaporan, dan surat-menyurat.

Jika asumsi ini benar, Desa Kepuh kemungkinan besar menghadapi berbagai implikasi negatif yang serius akibat proses penginputan data yang konvensional:

1. Ketidakefisienan dan Keterlambatan Pelayanan: Proses manual memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencatat, mencari, dan memverifikasi data. Hal ini menyebabkan lambatnya pelayanan publik, seperti pengurusan surat-surat administrasi, yang pada akhirnya mengurangi kepuasan masyarakat.
2. Kerentanan Data: Data yang disimpan dalam media kertas rentan mengalami kerusakan akibat faktor lingkungan seperti kelembaban, atau bahkan hilang sepenuhnya. Risiko ini tidak hanya mengancam kelangsungan data historis desa tetapi juga dapat menghambat proses audit dan akuntabilitas.
3. Kesulitan Integrasi Data: Tanpa sistem digital terintegrasi, data yang dikumpulkan dalam berbagai format yang berbeda akan sulit disinkronkan. Ketidakselarasan data ini dapat menyebabkan inkonsistensi yang signifikan, seperti yang terjadi di Belitung Timur yang datanya "sangat konvensional dan jauh dari digitalisasi".
4. Kurangnya Transparansi: Proses manual membuat akses informasi menjadi terbatas dan bergantung pada perangkat desa. Hal ini dapat menghambat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan penggunaan dana atau program pembangunan desa.

Berdasarkan model tantangan yang telah diuraikan, masalah kunci yang paling mungkin dihadapi oleh Pemerintah Desa Kepuh adalah:

1. Kapasitas SDM yang Terbatas: Perangkat desa mungkin tidak memiliki keterampilan dasar TI yang memadai untuk beralih ke sistem digital, yang merupakan hambatan utama dalam adopsi teknologi.
2. Keterbatasan Anggaran dan Infrastruktur: Investasi awal untuk pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan koneksi internet yang stabil bisa menjadi kendala finansial yang signifikan bagi desa.

3. Potensi Fragmentasi Data: Jika Desa Kepuh telah mengadopsi beberapa aplikasi pemerintah secara terpisah, mereka mungkin menghadapi masalah fragmentasi data dan duplikasi entri, yang justru menciptakan inefisiensi baru.

Studi Kasus Keberhasilan: Pembelajaran dari Desa-Desa Digital Terdepan

Meskipun tantangan digitalisasi desa sangat nyata, berbagai studi kasus di Indonesia membuktikan bahwa hambatan tersebut dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Analisis terhadap desa-desa yang berhasil bertransformasi memberikan pembelajaran berharga yang dapat diterapkan di Desa Kepuh.

1. Desa Kalikoa, Cirebon: Terletak di kabupaten yang sama dengan Desa Kepuh, Desa Kalikoa di Kecamatan Kedawung telah mengimplementasikan konsep "Desa Digital". Kepala desa, Misbakh Fauzi, menyadari bahwa mayoritas warganya melek teknologi. Mereka mengambil langkah strategis dengan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Relawan TIK, perusahaan teknologi, dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Cirebon. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa sinergi kolaboratif, atau model penta-helix, antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas, dan media, merupakan kunci untuk mempercepat digitalisasi.
2. Desa Cimari, Ciamis: Desa Cimari menerapkan "Sistem Desa Digital Terintegrasi" untuk layanan publik yang aman dan efisien. Sistem mereka memungkinkan warga untuk mengurus berbagai layanan administrasi secara daring, bahkan di tengah pandemi, dengan dokumen yang dapat diunduh dalam format PDF dengan tanda tangan elektronik. Keberhasilan mereka didukung oleh infrastruktur digital yang kuat dan antarmuka yang ramah pengguna. Ini membuktikan bahwa fokus pada kemudahan akses dan jaminan keamanan data sangat penting untuk mendorong adopsi teknologi oleh masyarakat dari berbagai latar belakang.
3. Desa Senga Selatan, Kabupaten Luwu: Transformasi Desa Senga Selatan berawal dari keresahan akan sistem pelayanan yang "ribet dan lamban". Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Andi Muhammad Arfan Basmin, mereka membangun sebuah "pusat komando desa" yang terintegrasi untuk memantau aktivitas desa dan menyediakan layanan. Inovasi mereka juga mencakup penggunaan web geospasial untuk pemetaan lahan dan rumah secara digital. Pembelajaran dari kasus ini adalah pentingnya visi kepemimpinan yang kuat dan penggunaan teknologi yang relevan dengan kebutuhan spesifik desa, seperti sistem geospasial untuk manajemen lahan.

Studi Kasus Lainnya:

1. Desa Loa Duri Ilir, Kutai Kartanegara: Desa dengan populasi lebih dari 13.000 jiwa ini berhasil mengatasi tantangan jumlah penduduk yang besar dengan mengimplementasikan sistem pelayanan mandiri yang terintegrasi.
2. Desa Sukapura, Bandung: Desa ini mengembangkan aplikasi seluler untuk mempermudah pengajuan surat, yang tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi warga tetapi juga transparansi dan akuntabilitas bagi pemerintah desa.
3. Desa Pucungrejo, Magelang: Desa ini menggunakan Sistem Informasi Desa (SID) untuk menyediakan data komprehensif tentang demografi, ekonomi, dan potensi wisata, yang kemudian dimanfaatkan untuk menyusun program pembangunan desa.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa meskipun tantangannya universal, solusinya dapat disesuaikan. Visi kepemimpinan, kolaborasi strategis, fokus pada keamanan dan kemudahan penggunaan, serta pemilihan teknologi yang tepat, adalah faktor-faktor kunci yang dapat mengubah tantangan menjadi peluang.

Usulan Solusi Peningkatan Efisiensi untuk Desa Kepuh, Palimanan

Untuk mengatasi masalah inefisiensi penginputan data di Desa Kepuh, Palimanan, diperlukan sebuah pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada aspek sumber daya manusia dan tata kelola. Berdasarkan analisis permasalahan dan pembelajaran dari studi kasus yang berhasil, laporan ini merekomendasikan sebuah strategi bertahap.

1. Fase 1: Implementasi Sistem Digital Terintegrasi (Strategi Jangka Pendek)

Langkah pertama yang paling strategis adalah mengadopsi satu sistem digital yang terintegrasi secara penuh untuk menggantikan proses manual dan mengatasi masalah fragmentasi aplikasi. Daripada menggunakan berbagai aplikasi pemerintah yang terpisah (seperti SID, SISKEUDES, SIAK, dll.), Desa Kepuh dapat memilih platform yang menawarkan fitur lengkap dalam satu dasbor. Ada beberapa opsi perangkat lunak komersial yang tersedia di pasar, seperti EasyDes dan Simdesa.

Tabel 1 berikut membandingkan fitur dan karakteristik beberapa pilihan sistem informasi desa yang dapat dipertimbangkan oleh Desa Kepuh:

Tabel 1. Sistem Informasi Desa

Nama Aplikasi	Fitur Utama	Keunggulan	Keterbatasan	Sumber Data
SISKEUDES	Penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa.	Dibuat oleh BPKP, sederhana, ramah pengguna, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Fragmentasi, hanya berfokus pada keuangan, tidak terintegrasi dengan data kependudukan atau layanan lainnya.	

Sistem Informasi Desa (SID)	Profil pemerintahan desa, data desa, dan berita.	Diatur oleh UU No. 6/2014, mendukung keterbukaan informasi publik.	Terbatas pada informasi profil dan berita, tidak memiliki fitur lengkap untuk pengelolaan kependudukan, keuangan, atau layanan mandiri.
EasyDes	Manajemen data penduduk, laporan kependudukan, verifikasi data, pelayanan publik online, data pegawai, arsip digital, dan fitur terintegrasi dalam satu platform.	Menawarkan solusi "All in One" dengan fitur lengkap. Fleksibel, dapat diakses daring atau luring, dan didukung oleh tim pendukung.	Biaya investasi awal mungkin menjadi kendala, tergantung pada paket yang dipilih.
Simdesa	Informasi desa lengkap, pelayanan publik online, manajemen bansos, kependudukan, statistik, dan absensi kehadiran.	Terintegrasi dengan web, Android, dan iOS. Menawarkan berbagai paket dengan dukungan teknis (termasuk tim IT pendamping).	Biaya investasi awal dan hosting yang harus dipertimbangkan.

Berdasarkan perbandingan ini, memilih platform terintegrasi seperti EasyDes atau Simdesa dapat menjadi solusi yang lebih efisien dibandingkan mengelola banyak aplikasi yang terpisah. Platform ini memungkinkan perangkat desa untuk melakukan penginputan data tunggal yang kemudian secara otomatis tersinkronisasi ke berbagai modul, seperti laporan kependudukan, statistik, dan pelayanan surat, mengurangi duplikasi pekerjaan dan meningkatkan akurasi data.

2. Fase 2: Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur (Strategi Jangka Menengah)

Implementasi teknologi tidak akan berhasil tanpa investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur. Setelah sistem digital dipilih, Desa Kepuh harus memfokuskan sumber daya pada dua area kunci:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM: Mengatasi kesenjangan kompetensi perangkat desa melalui program pelatihan yang intensif dan praktis. Pelatihan ini tidak hanya harus mencakup cara mengoperasikan aplikasi, tetapi juga pemahaman tentang manajemen data, keamanan informasi, dan pentingnya akurasi data. Mendorong perangkat desa untuk memahami teknologi sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan, bukan sebagai

beban administratif, adalah kunci sukses.

- b. Peningkatan Infrastruktur: Mengalokasikan anggaran khusus untuk memastikan konektivitas internet yang stabil dan memadai. Ini termasuk pengadaan perangkat keras yang dibutuhkan seperti komputer atau tablet. Investasi ini harus dilihat sebagai modal jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, bukan sekadar biaya operasional.

3. Fase 3: Kemitraan Strategis dan Tata Kelola Berkelanjutan (Strategi Jangka Panjang)

Untuk memastikan keberlanjutan proyek digital, Desa Kepuh harus membangun ekosistem yang kolaboratif.

- a. Membangun Kemitraan Strategis: Meniru keberhasilan Desa Kalikoa dan Desa Senga Selatan, Desa Kepuh dapat menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, atau bahkan pihak swasta yang berfokus pada digitalisasi desa. Kemitraan semacam ini dapat memberikan dukungan teknis, pelatihan lanjutan, dan pendanaan tambahan.
- b. Mendorong Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat sistem informasi desa. Ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pembuatan fitur yang mempermudah interaksi masyarakat dengan pemerintah desa, seperti fitur pengaduan dan layanan mandiri. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan akurasi data dan menciptakan rasa kepemilikan terhadap program digitalisasi.
- c. Membangun Tata Kelola Data yang Kokoh: Membangun kesadaran akan pentingnya keamanan dan privasi data. Dengan data penduduk yang terpusat secara digital, isu keamanan menjadi sangat penting. Adanya regulasi internal desa dan pelatihan tentang perlindungan data dapat mencegah masalah seperti pelanggaran data dan serangan siber.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Analisis menunjukkan bahwa inefisiensi dalam proses penginputan data di desa, yang diasumsikan juga terjadi di Desa Kepuh, Palimanan, berakar pada ketergantungan pada metode konvensional berbasis kertas dan tantangan multidimensi yang mencakup keterbatasan SDM, anggaran, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Namun, studi kasus dari desa-desa lain yang berhasil membuktikan bahwa tantangan ini dapat diatasi melalui strategi yang terencana dan kolaboratif.

Untuk mewujudkan tata kelola yang efisien dan modern, Desa Kepuh, Palimanan, sangat direkomendasikan untuk mengadopsi peta jalan strategis sebagai berikut:

Rekomendasi Praktis untuk Desa Kepuh:

1. **Rekomendasi 1 (Jangka Pendek):** Segera pilih dan adopsi satu platform digital terintegrasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran desa. Menggunakan aplikasi "all in one" seperti EasyDes atau Simdesa dapat menjadi solusi yang paling efisien untuk menggantikan proses manual yang terfragmentasi.
2. **Rekomendasi 2 (Jangka Menengah):** Alokasikan anggaran khusus dan berkelanjutan untuk program peningkatan kapasitas SDM dan perbaikan infrastruktur. Pelatihan harus

praktis dan berfokus pada pembangunan kompetensi dasar TI, sementara investasi infrastruktur harus menjamin konektivitas internet yang stabil.

3. Rekomendasi 3 (Jangka Panjang): Bentuk tim khusus untuk mengelola proyek digitalisasi dan jalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Mendorong partisipasi aktif masyarakat harus menjadi bagian integral dari strategi ini untuk memastikan data yang akurat dan dukungan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erida, Saadah, M. A., Syeftiani, T., Suri, A., & Fachrezi, Z. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Sistem Informasi Desa dalam Rangka Peningkatan Good Governance Desa. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(4), 2144–2152. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i4.3588>
- Fakhrurrazi, F., Nurhafni, N., Ula, M., Setiawan, A. L., & Arpika, A. M. (2022). Pengembangan Desa Digital dalam Pelayanan Publik dan Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi di Gampong Reulet Timur. *Rambideun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 252-260. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i3.3159>
- Khusnah, L., Lailiyah, N. R., Imdad, S., & Masruroh, F. (2022). Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi Desa Berbasis Digital kepada Perangkat Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 2(2), 159-162. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v2i2.301>
- Oktavianty, O., & Djafar, M. F. (2024). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Digital dalam Pemerintahan Desa untuk Meningkatkan Efisiensi Administrasi. *Journal of Human and Education*, 4(1), 112-121. <https://doi.org/10.31004/jhe.v4i1.599>
- Ariesta, A., Fatimah, T., & Annissa, J. (2023). Penerapan Good Governance melalui Sistem Informasi Desa Digital pada Desa Wanagiri, Kecamatan Saketi-Pandeglang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 145-156.
- Supriyadi, S., Kurniawan, A., & Hidayat, R. (2025). Pelatihan Pembuatan Google Form bagi Aparat Desa untuk Menunjang Tugas di Desa Sangkanhurip. *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment*, 4(1), 78-89.
- Maryana, S., & Wibowo, A. (2025). Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 234-248. <https://doi.org/10.35912/ijpar.v2i3.4004>
- Setiawan, B., & Pratama, D. (2024). Implementasi E-Government untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 156-172.
- Arifin, Z., & Susanto, H. (2023). Sistem Informasi Pengolahan Data Penduduk Berbasis Web Desa Compang Mekar Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(2), 287-296.
- Republika Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Pedoman Umum Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. Jakarta: BPKP.